



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN SEPTEMBER 2016**

Pendahuluan

Fungsi pokok Komnas HAM adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **806 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	7	20	Kalimantan Barat	11
2	Sumatera Utara	87	21	Kalimantan Selatan	4
3	Bengkulu	4	22	Kalimantan Tengah	4
4	Jambi	11	23	Kalimantan Timur	13
5	Riau	27	24	Kalimantan Utara	0
6	Sumatera Barat	66	25	Gorontalo	1

*Laporan Bulanan Paripurna / Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan
Putu Sri
021-3925230 ext 126/142*

7	Sumatera Selatan	15	26	Sulawesi Selatan	32
8	Lampung	10	27	Sulawesi Tenggara	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	28	Sulawesi Tengah	19
10	Kepulauan Riau	6	29	Sulawesi Utara	4
11	Banten	22	30	Sulawesi Selatan Barat	3
12	Jawa Barat	84	31	Maluku	37
13	DKI Jakarta	185	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	34	33	Papua	7
15	Jawa Timur	47	34	Papua Barat	0
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	35	Tanpa Alamat	16
17	Bali				6
18	Nusa Tenggara Barat				13
19	Nusa Tenggara Timur				8

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	462
2	Subkomisi mediasi	94
3	Tim 65	19
4	Tim KZ	0
5	File	231
Jumlah		806

3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	365
2	Tembusan	436
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	5
Jumlah		860

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	66
2	Pos	711

3	Fax	12
4	Email	10
5	Audiensi	5
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	2
Jumlah		806

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	29
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	16
4	Hak memperoleh keadilan	309
5	Hak atas kebebasan pribadi	19
6	Hak atas rasa aman	73
7	Hak atas kesejahteraan	304
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	5
9	Hak perempuan	7
10	Hak anak	4
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	3
12	Non HAM	37
Jumlah		806

5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	13
Lingkungan hidup	16
Jumlah	29
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	10
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	6
Jumlah	16
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	223

Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	20
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	59
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	7
Jumlah	309
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	14
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
Jumlah	19
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	15
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	14
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	17
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	15
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	11
Jumlah	73
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	21
Hak atas kepemilikan tanah	127
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	62
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	33
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	40
Hak atas kesehatan	17
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
Jumlah	304
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0

Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	4
Jumlah	5
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	3
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
Jumlah	7
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	0
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	4
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	4
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	2
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
Jumlah	3
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	37

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	414
2	Individu - Anak	13
3	Individu - Perempuan	18
4	Individu - Buruh migran	1
5	Individu - Pekerja / profesi	27
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	2
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
9	Individu - Penyandang disabilitas	0

10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
12	Individu - Lansia	2
13	Individu - Fakir miskin	1
14	Kelompok - Masyarakat	195
15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	2
18	Kelompok - Pekerja / profesi	39
19	Kelompok - Masyarakat adat	14
20	Kelompok - Ras dan etnis	3
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	14
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	0
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	4
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	1
29	Korporasi	4
30	Lembaga Pendidikan	5
31	Polri	0
32	Pemerintah Daerah	2
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	27

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	78
2	Pemerintah daerah	96
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	7
5	Lembaga peradilan	53
6	Kepolisian	251
7	TNI	46
8	Kejaksaan	29
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	9
10	Pemerintah negara lain	0
11	Korporasi	121
12	BUMN / BUMD	28
13	Lembaga pelayanan kesehatan	5
14	Lembaga pendidikan	14
15	Organisasi	4

16	Individu - Orang seorang	15
17	Individu - Pekerja / profesi	11
18	Kelompok - Masyarakat	8
19	Kelompok - Masyarakat adat	1
20	Individu – Perempuan	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	30

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
18	74	18	110

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

Jakarta, 3 September 2016

¹ Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

² Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim